

EVALUASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG

Elmina Dianti Qasanova dan Tuti Khairani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation the Arrangement and Development of a Merchant. Research is aimed to know evaluation and factors affecting the implementation of regional regulation no.11 2001 concerning the arrangement and flanking street vendors city pekanbaru. Methods used in this research is a qualitative, descriptive a research intended to be a systematic give a description of the phenomena observed. Based on the results of this research was evaluation the arrangement and flanking traders still keputusan evaluation of the stage controlling associated with the program and sanctions given. Next is the stage evaluation in the preparation of the relocation of or related to the location of selling in addition to locations maximally the determination of the location of the relocation, there are also problems multiple ownership condition of certain parties and interests. Next evaluation development using briefing with the language more understood by a merchant.

Abstrak: Evaluasi Penataan dan Pembinaan Pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, suatu penelitian dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran yang sistematis tentang fenomena yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian ini evaluasi penataan dan pembinaan pedagang masih berupa evaluasi dari tahap penertiban terkait dengan sosialisasi program serta sanksi-sanksi yang diberikan. Berikutnya adalah tahap evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi terkait pemberian lokasi berjualan selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi, juga terdapat masalah kepemilikan ganda dan syarat kepentingan pihak-pihak tertentu. Evaluasi berikutnya pembinaan menggunakan pembekalan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang.

Kata Kunci: evaluasi, kebijakan, penataan dan pembinaan, pedagang kaki lima

PENDAHULUAN

Salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Konsentrasi pedagang kaki lima yang dapat ditemui di Kota Pekanbaru, yaitu dekat dengan pusat komersial, seperti di Sepanjang Jalan Subrantas, Soekarno Hatta, Pepaya dan Arifin Ahmad. Sedangkan jumlah mereka di masing-masing daerah sukar dihitung, sehingga dengan demikian, melalui Perda No. 11 Tahun 2001 tersebut, PKL harus dilakukan penataan dan pembinaan dengan merelokasi mereka ke tempat yang nyaman dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan keindahan lingkungan.

Salah satu tempat penataan dan pembinaan pedagang tersebut adalah di Kawasan Jl Balam Sakti Panam Pekanbaru. Pedagang yang dipindah

ke kawasan ini adalah para pedagang yang dahulunya memadati kawasan komplek pertokoan Purwodadi (Samping Riau Pos), dimana dengan keberadaan mereka telah menimbulkan kemacetan yang parah, untuk itulah perlu dilakukan penataan ulang dan pembinaan.

Kenyataan di lapangan, ternyata masih banyak PKL yang tidak bersedia untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Dari 237 PKL yang ada pada saat itu, hanya 160 PKL yang bersedia untuk dipindah, sedangkan 77 PKL lainnya menolak. Akibatnya, beberapa waktu lalu terjadi bentrokan antara petugas Satpol PP dengan para PKL ketika akan dilakukan penertiban. Satu sisi petugas menilai tindakan mereka sudah benar berdasarkan aturan yang ada, namun di sisi lain para PKL merasa bukan solusi yang diberikan pemerintah dalam rangka pemindahan mereka, sehingga mereka melawan.

Awal pemindahan banyak PKL yang tidak

mau dipindahkan ke lokasi yang baru untuk dilakukan penataan dan pembinaan melalui Perda No. 11 Tahun 2001. Lokasi yang ditentukan, yakni di Jl Balam Panam Pekanbaru dikeluhkan oleh pedagang karena fasilitas yang tidak memadai. Kepemilikan Kios ternyata tidak representatif, banyak pedagang yang memiliki kios lebih dari satu, dan banyak pedagang yang tidak mendapatkan kios.

Pembinaan dan penataan untuk PKL berdasarkan Perda No 11 Tahun 2001 belum mengikutsertakan berbagai macam kepentingan para PKL dan penerapan yang cenderung dipaksakan sehingga memunculkan polemik yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Untuk itu, perlu adanya evaluasi apakah Perda No 11 Tahun 2001 telah dilaksanakan dengan menyesuaikan standarisasi pelaksanaan kebijakan yang baik

Wandt dan Brown dalam Soedijono (2009) memberikan definisi evaluasi *refer to the act of process to determining the value of something*. Menurut pengertian tersebut, evaluasi menunjukkan kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok (Nugroho, 2008). *Pertama*, bagaimana kinerja implementasi kebijakan, sejauh mana variasi kesesuaian capaian kebijakan (*output* dan *outcomes* yang dihasilkan dari proses implementasi) dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. *Kedua*, faktor-faktor apa yang menyebabkan variasi tersebut? Apakah karena faktor yang terkait dengan isi program/kebijakan itu sendiri, apakah karena cara kerja dalam pengorganisasian implementasi kebijakan (*output* yang terkait dengan kinerja implementers); atau karena lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi *outcomes* tersebut. *Ketiga*, bagaimana strategi untuk lebih meningkatkan kinerja implementasi kebijakan? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tugas pengevaluasi untuk memilih variable-variabel yang dapat diubah (*actionable variables*).

METODE

Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadi suatu sapek fenomena sosial tertentu, sekaligus pula mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu melalui uraian dengan argumen yang jelas. Penelitian deskriptif seperti biasanya dilakukan tanpa suatu hipotesa tertentu yang dirumuskan secara ketat, walaupun menggunakan hipotesa tetapi bukan dari hasil uji secara statistik. Oleh karena itu, penelitian deskriptif berupa menjabarkan atau menganalisis, maka sifat penelitian yang digunakan disini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu keadaan (obyek) dan di dalamnya terdapat upaya deskriptif, pencatatan, dan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senggol Jl Balam Sakti Panam Kota Pekanbaru merupakan sebuah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Tahapan-tahapan yang diungkap ini senada dengan tahap pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senggol Jl Balam Sakti Panam Kota Pekanbaru. Dari tahap pertama kesadaran akan kesalahan pedagang kaki lima yang berjualan bukan pada tempat yang seharusnya kemudian dibimbing agar mereka mengerti dan tidak berjualan pada daerah-daerah yang terlarang. Untuk tahap kedua kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap ini berupa bantuan dari pemerintah kota lewat dinas koperasi perindustrian dan perdagangan memberi penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha serta pemberian bantuan modal agar pedagang kaki lima dapat mengembangkan usaha serta cerdas untuk membuat strategi pemasaran untuk menjajakan dagangannya.

Untuk membantu pedagang kaki lima yang bermodal kecil supaya mendapatkan pinjaman. Sedangkan untuk tahap ketiga tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan untuk tahap ini sebenarnya hampir sama berupa bimbingan usaha namun lebih menekankan pada ketrampilan atau skill para pedagang kaki lima untuk menciptakan inovasi dagangan yang beda dari pedagang-pedagang kaki lima lain yang ada di kawasan Pasar Senggol Jl Balam Sakti Panam Kota Pekanbaru. Namun keselarasan hal tersebut tidak diselaraskan dengan keberhasilan yang ada di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Pada kenyataannya masih banyak penertiban yang ada di Kota Pekanbaru hanya sekedar penertiban tanpa memberikan solusi dan kepastian lokasi yang disediakan hal itu terjadi karena lokasi yang disediakan pemerintah cukup terbatas dan hanya menampung beberapa pedagang kaki lima.

Setiap pelaksanaan sebuah kebijakan hampir semuanya dapat dipastikan terdapat masalah-

masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan dampak yang diinginkan atau belum. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002) bahwa evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Dari sini dapat dilihat bahwa evaluasi digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sebab-sebab sebuah kebijakan berjalan maksimal atau tidak. Dan masalah-masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Pekanbaru. Misalnya masalah internal dalam pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di kawasan Pasar Senggol Jl Balam Sakti Panam Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para PKL dan juga kurang maksimalnya lokasi yang disediakan.

Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah kota lewat Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dalam membantu pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senggol dirasa sangat kecil. Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar selama ini kurang begitu tegas hal itu bisa dilihat pada penertiban pedagang kaki lima hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran alat-alat dan barang dagangan para pedagang. Masalah eksternal dalam penataan dan pembinaan PKL yang dilakukan terhambat adalah tingkat pendidikan para PKL. Tingkat pendidikan para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SMP atau sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Peraturan Daerah No 11 tahun 2001 sehingga mereka tidak mengerti masalah-masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Masalah karakteristik atau sifat dari setiap PKL yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari PKL ini yang membuat sulit pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembinaan PKL. Dari beberapa masalah diatas jika dihubungkan dengan teori dari Winarno dapat dikatakan bahwa permasalahan diatas yang membuat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di di kawasan Pasar Senggol Jl Balam Sakti Panam Kota Pekanbaru menjadi kurang maksimal.

Permasalahan yang timbul mulai dari pedagang kaki lima itu sendiri sampai dengan yang timbul dari pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri. Permasalahan seperti hal di atas seharusnya secepatnya diselesaikan dan dicari solusinya agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada tahap berikutnya dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada permasalahan yang sama dengan penataan dan pembinaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Casley dan Kumar dalam Wahab (2001) merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Begitu pula evaluasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Senggol Kota Pekanbaru.

Sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Mempertegas sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang telah mendapat teguran atau bahkan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 Kota Pekanbaru, yaitu pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 5000. 000. Pemberian sanksi kurungan dan denda tersebut agar member efek jera para pedagang kaki lima yang masih saja melanggar aturan.

Untuk kawasan di kawasan Pasar Senggol, PKL yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota

Pekanbaru. Kawasan tersebut belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima dari tempat asalnya berjualan karena masih diprioritaskan untuk pindahan dari kawasan Purwodadi saja. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru juga memikirkan kepentingan PKL di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan sosial oleh pedagang kaki lima karenadilihat pada saat dilapangan beberapa pedagang sudah mulai berdatangan untuk berdagang pada lokasi sekitaran benteng pancasila tersebut, akan tetapi karena tidak mendapat tempat yang seharusnya mereka banyak berjualan pada pinggir pinggir jalan kembali.

Untuk sarana penunjang yang ada di lokasi relokasi juga sangat berpengaruh karena sering adanya komplek dari pedagang kaki lima mulai dari lokasi yang tergenang air saat hujan, toilet yang rusak padahal baru sebentar digunakan lahan parkir yang minim serta sarana pembuangan sampah yang kurang. Memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima mulai kalangan kecil hingga menengah. Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima sehingga dana bantuan permodalan tersebut lebih bisa mencakup lebih banyak lagi pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan permodalan. Dalam memberikan pembinaan terhadap PKL seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima karena rata rata banyak pedagang kaki lima yang berpendidikan rendah sehingga mereka kurang mengerti dengan pembekalan pembinaan yang berbelit-belit.

Beberapa evaluasi di atas jika dihubungkan dengan teori yang dipaparkan Casley dan Kumar dalam Wahab (2001) merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi diatas merupakan penilaian yang terjadi pada program penataan dan pembinaan PKL di kawasan Pasar Senggol Kota Pekanbaru.

Dalam kenyataannya program penataan dan pembinaan tersebut masih perlu banyak

pembenahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut bisa dilihat dari kurang maksimalnya lokasi yang disediakan oleh pemerintah kota untuk pedagang kaki lima, bantuan permodalan yang kurang maksimal karena hanya sebagian pedagang saja yang mendapatkannya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat pemerintah kota dalam menindak pedagang kaki lima, perlunya proses pembinaan pedagang kaki lima yang mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa dalam konteks kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan dan pembinaan PKL di kawasan Pasar Senggol Kota Pekanbaru kurang begitu maksimal. Karena itu, perlunya adanya sebuah evaluasi untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program penataan dan pembinaan PKL, sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap-tahap berikutnya.

SIMPULAN

Penertiban PKL terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi yang diberikan terhadap yang melanggar peraturan dan mempertegas sanksi yang diberikan pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000. Evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi terkait pemberian lokasi berjualan dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Pekanbaru juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan sosial. Selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi, juga terdapat masalah kepemilikan ganda dan syarat kepentingan pihak-pihak tertentu. Evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima seperti memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan PKL atau memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi setiap PKL. Evaluasi pada tahap pembinaan PKL dalam memberikan pembinaan terhadap PKL seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh PKL.

DAFTAR RUJUKAN

- Badjuri dan Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep & Strategi*. Semarang: UNDIP Press
- Dunn, William, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Dye, Thomas R., 1978, *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Hoogerwerf, Dennis, 2001. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, Irfan M., 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T., 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustopadidjaja, 2007. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Duta Pertiwi Foundation
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Santoso, Ahmad. 1998. *Kisi-Kisi Kebijakan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Soewargono, Windarto, 1997. *Kebijakan Publik*. Bandung: Ganesha Exact.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Tangkilisan, Nogi, Hessel, 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Yogyakarta: Balairung & Co
- Thoha, Miftah, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Usman, Arifin, 2003. *Kebijakan dan Administrasi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winardi, Ahmadi, 2001. *Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta.